



## PENDAMPINGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Bambang Triono<sup>1</sup>, Irvan Nur Ridho<sup>2\*</sup>, Robby Darwis Nasution<sup>3</sup>, Insyira Yusdiawan Azhar<sup>4</sup>, Leuryan Chery Lorenza<sup>5</sup>

<sup>1,2\*,3,4,5</sup> Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo

<sup>1</sup>bambang.triono@umpo.ac.id, <sup>2\*</sup>irvannurridho@gmail.com, <sup>3</sup>darwinsnasiution69@gmail.com, <sup>4</sup>insyirayusdiawanazhar@umpo.ac.id, <sup>5</sup>leuryancherry21.com@gmail.com

### Article History:

Received: October 19<sup>th</sup>, 2025

Revised: December 10<sup>th</sup>, 2025

Published: December 15<sup>th</sup>, 2025

**Abstract:** This empowerment program was carried out in Baosan Lor Village, Ngrayun District, Ponorogo Regency, with the aim of increasing the digital literacy of village officials and encouraging the use of communication and information technology (ICT) to realize transparent and accountable governance. The main problems faced by partners are the low skills of village officials in operating computers and the internet, as well as the lack of optimal use of village websites as a means of transparency of public information. The methods used include socialization, digital literacy training, assistance in managing village websites, and the establishment of a digital forum for community aspirations. Provisional results show an increase in the capacity of village officials, initiatives to use social media for publications, and growing public awareness of the importance of participation in village governance. These findings indicate that ICT assistance has the potential to increase the transparency and accountability of village governments.

**Keywords:** Digital literacy, village governance, transparency, accountability, community service.

### Abstrak

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, dengan tujuan meningkatkan literasi digital aparatur desa serta mendorong pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya keterampilan perangkat desa dalam mengoperasikan komputer dan internet, serta belum optimalnya pemanfaatan website desa sebagai sarana transparansi informasi publik. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, pelatihan literasi digital, pendampingan pengelolaan website desa, serta pembentukan forum digital aspirasi masyarakat. Hasil sementara menunjukkan adanya peningkatan kapasitas aparatur desa, inisiatif penggunaan media sosial untuk publikasi, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam tata kelola desa. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendampingan TIK berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa serta dapat direplikasi pada desa lain.

**Kata Kunci:** literasi digital, tata kelola desa, transparansi, akuntabilitas, pengabdian masyarakat.

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi sebuah keniscayaan. Pemerintahan desa sebagai garda terdepan pelayanan publik di tingkat akar rumput, dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Tanpa adopsi TI yang memadai, pemerintahan desa akan sulit memberikan pelayanan publik yang efektif dan memenuhi tuntutan keterbukaan informasi. Berdasarkan penelitian (Isnaini et al., 2023), penggunaan teknologi informasi di pemerintahan desa terbukti dapat meningkatkan transparansi anggaran dan mempercepat pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sementara itu, studi (Nurahma & Hendriani, 2021) menegaskan bahwa penerapan sistem informasi desa berbasis web mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa.

Namun dalam kenyataannya, masih banyak desa yang mengalami hambatan dalam penerapan teknologi, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, maupun minimnya literasi digital (Hidayat, 2019). Hal ini juga ditemukan di Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, yang menjadi lokasi pengabdian ini. Dari hasil observasi, Desa Baosan Lor telah memiliki fasilitas website desa, namun belum dioptimalkan untuk keperluan transparansi laporan keuangan, pelayanan publik berbasis daring, dan keterbukaan informasi. Dari 12 perangkat desa, hanya 4 orang yang terbiasa menggunakan komputer, dan hanya 2 orang yang memiliki keterampilan dasar pengelolaan website dan media sosial. Sisanya 6 orang belum mahir dalam menggunakan komputer tingkat dasar.

Menurut (Nugraha et al., 2022), pelatihan dan pendampingan penggunaan TI secara intensif mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa hingga 70% dalam mengelola informasi publik. Pengalaman program serupa di desa-desa lain juga menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi desa tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi (Rizal et al., 2022). Dalam mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan 16 yaitu "Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat", penguatan kapasitas teknologi informasi di tingkat desa menjadi aspek strategis (Rachman et al., 2022).

Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian ini, dilakukan intervensi program "Pengembangan Penggunaan Teknologi Informasi di Pemerintahan Desa untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas" di Desa Baosan Lor, dengan fokus pada pelatihan, pengembangan website desa aktif, pengelolaan media sosial desa, dan penyusunan SOP pelayanan publik berbasis TI. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "*Pendampingan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel*" di Desa Baosan Lor merupakan respons terhadap rendahnya literasi digital dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar perangkat desa masih belum terbiasa menggunakan komputer maupun internet dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Website desa yang sudah tersedia juga belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menyampaikan laporan keuangan, informasi pembangunan, maupun layanan berbasis digital. Kondisi ini berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola desa, serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur desa ((Isnaini et al., 2023); (Rizal et al., 2022)).

## METODE

Program pengabdian dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan perangkat desa sebagai mitra aktif dalam setiap tahapan. Metode pelaksanaan meliputi:

1. Sosialisasi, penyampaian pentingnya pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan di desa Baosan Lor.
2. Pelatihan literasi digital, mencakup penggunaan komputer dasar, aplikasi perkantoran, serta pengelolaan konten website desa Baosan Lor.
3. Workshop pengelolaan media sosial, untuk publikasi kegiatan desa dan laporan keuangan.
4. Pendampingan penyusunan SOP administrasi digital, sebagai pedoman berkelanjutan dalam pengelolaan data dan informasi.
5. Pembentukan forum digital aspirasi masyarakat, sebagai kanal komunikasi resmi antara desa dan warga.

## HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berjudul “Pendampingan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel” di Desa Baosan Lor menunjukkan dinamika proses pendampingan yang berlangsung secara kolaboratif dan partisipatif antara tim dosen, mahasiswa, dan mitra sasaran. Pendampingan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis aparatur desa, tetapi juga diarahkan pada transformasi sosial menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka, akuntabel, dan berbasis teknologi.



**Gambar 1. Sosialisasi Pentingnya Penggunaan Teknologi Informasi Untuk Menunjang Pelayanan Publik**

Proses pendampingan diawali dengan kegiatan sosialisasi program, yang berfungsi membangun kesadaran bersama tentang pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Melalui sesi dialog interaktif, tim pengabdian dan mitra desa bersama-sama mengidentifikasi permasalahan utama, antara lain rendahnya literasi digital aparatur, belum optimalnya pemanfaatan website desa, dan terbatasnya media komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat.



**Gambar 2. Pelatihan Aplikasi Dasar Microsoft**

Tahapan berikutnya berupa pelatihan teknis literasi digital dasar bagi perangkat desa. Kegiatan ini meliputi pengenalan perangkat komputer, penggunaan aplikasi perkantoran (Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint), serta pelatihan pembuatan dokumen administrasi digital. Pendekatan learning by doing digunakan agar peserta dapat langsung mempraktikkan keterampilan baru. Dari hasil pelatihan, sebagian besar peserta mulai mampu mengoperasikan komputer dan memahami fungsi internet dalam mendukung kegiatan administrasi dan pelayanan publik. Selanjutnya dilaksanakan workshop pengelolaan website dan media sosial desa sebagai bentuk aksi program konkret untuk memperkuat transparansi publik. Dalam kegiatan ini, perangkat desa bersama tim pendamping memperbarui struktur website, mengunggah laporan keuangan dan kegiatan pembangunan, serta membuat konten informatif yang dapat diakses masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana membangun kesadaran akan pentingnya open government di tingkat desa.



**Gambar 3. Pembentukan Forum Digital Aspirasi Warga**

Selain pelatihan teknis, tim pengabdian juga memfasilitasi pembentukan forum digital aspirasi warga, yaitu ruang komunikasi daring yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan terhadap kebijakan desa. Forum ini memanfaatkan platform sederhana seperti

grup media sosial dan formulir digital (Google Form), sehingga mudah diakses oleh warga. Kehadiran forum ini menjadi bentuk inovasi sosial baru yang memperkuat hubungan dialogis antara pemerintah dan masyarakat.

Dari rangkaian kegiatan tersebut, mulai tampak adanya perubahan sosial positif di lingkungan mitra. Pertama, muncul perubahan perilaku aparatur desa, yang kini lebih terbuka terhadap inovasi dan mulai rutin mempublikasikan laporan serta kegiatan pemerintahan secara digital. Kedua, terbentuk Tim Teknologi Informasi Desa, yang terdiri dari perangkat muda dan anggota karang taruna. Tim ini menjadi penggerak utama dalam pengelolaan sistem informasi desa dan penguatan komunikasi digital antara pemerintah dan warga. Ketiga, dari proses pendampingan juga mulai memiliki inisiatif dan kepedulian terhadap keterbukaan informasi publik.

Perubahan sosial yang diharapkan dari proses pendampingan ini adalah terbangunnya kesadaran baru menuju transformasi sosial di tingkat desa. Kesadaran tersebut mencakup pemahaman bahwa teknologi bukan sekadar alat bantu administrasi, melainkan sarana strategis untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi warga, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas teknis aparatur, tetapi juga menumbuhkan budaya baru pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif di Desa Baosan Lor.

## PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian menghasilkan beberapa temuan penting. Pertama, literasi digital aparatur desa meningkat, ditandai dengan kemampuan mengoperasikan komputer dan aplikasi dasar, serta mengelola konten sederhana di website desa (Nugraha et al., 2022). Kedua, terdapat inisiatif pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi publik, yang mempercepat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat (Saputra et al., 2018).

Melalui program pendampingan, tim pengabdian menawarkan solusi berupa pelatihan literasi digital, pengelolaan konten website desa, penyusunan SOP administrasi berbasis teknologi, serta pembentukan forum digital aspirasi masyarakat. Hasil sementara menunjukkan adanya peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi perkantoran, serta mulai muncul inisiatif penggunaan media sosial desa untuk publikasi informasi publik. Selain itu, kegiatan ini mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam memberikan masukan melalui kanal komunikasi digital, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas sosial pemerintahan desa (Nugraha et al., 2022); (Saputra et al., 2018).

Peran mitra, dalam hal ini Pemerintah Desa Baosan Lor, sangat signifikan. Mitra tidak hanya sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai penyedia data, fasilitator lokasi kegiatan, dan agen perubahan yang memastikan keberlanjutan program. Dukungan mitra juga ditunjukkan melalui komitmen pendanaan padanan (sharing dana) yang dialokasikan untuk menunjang transportasi pelaksanaan kegiatan. Hal ini mencerminkan adanya kolaborasi yang kuat antara tim pengabdian dan mitra dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Hidayat, 2019).

Temuan sementara mengindikasikan adanya peningkatan literasi digital aparatur desa dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya transparansi. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur internet dan resistensi sebagian kecil perangkat desa terhadap perubahan sistem kerja berbasis teknologi. Meski demikian, keberadaan SOP administrasi digital dan forum aspirasi warga menjadi inovasi yang dapat direplikasi di desa lain sebagai praktik baik (best

practice) dalam tata kelola berbasis teknologi (Bilyastuti et al., 2023).

Rencana ke depan dari program ini adalah memperkuat kapasitas aparatur melalui *training of trainers* (ToT), mengembangkan sistem informasi desa berbasis website yang lebih komprehensif, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Program ini juga diarahkan untuk mendukung roadmap Prodi Ilmu Pemerintahan dan LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya dalam bidang penguatan tata kelola pemerintahan, transformasi digital, serta pencapaian tujuan SDGs poin 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*). Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik (Adiyanto & Supriatna, 2018); (Rahman et al., 2017).

## KESIMPULAN

Program pengabdian ini berhasil meningkatkan kapasitas literasi digital aparatur Desa Baosan Lor serta mendorong pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan desa. Hasil sementara menunjukkan adanya peningkatan transparansi informasi, partisipasi masyarakat, serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas publik. Meskipun masih terdapat tantangan teknis, program ini memiliki potensi untuk direplikasi pada desa lain sebagai model pendampingan tata kelola berbasis teknologi.

## PENGAKUAN / ACKNOWLEDGEMENTS

Tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat berjudul “Pendampingan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel” menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program ini.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas dukungan pendanaan, arahan, dan fasilitasi administratif selama kegiatan berlangsung. Penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Desa Baosan Lor, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, khususnya Bapak Parlan selaku Kepala Desa, yang telah menjadi mitra utama dan menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa.

Tim pengabdian juga mengapresiasi partisipasi aktif seluruh perangkat desa dan masyarakat Baosan Lor yang telah antusias mengikuti pelatihan literasi digital, workshop pengelolaan website, serta forum aspirasi warga. Peran serta mereka sangat menentukan keberhasilan proses pendampingan dan keberlanjutan program.

Akhirnya, apresiasi disampaikan kepada seluruh pihak lain yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga sinergi ini menjadi awal yang baik bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis teknologi dan pengembangan pengabdian masyarakat berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Adiyanto, Y., & Supriatna, Y. (2018). Analisis strategi promosi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Lebak Banten. *Jurnal Sains Manajemen*, 4(2), 83–93.

- Bilyastuti, M. P., Suryanto, A., Heriana, T., Nawawi, I., & Yuanita, A. (2023). Pengaruh desa model smart village berbasis teknologi informasi dan komunikasi. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(4), 2180–2188.
- Hidayat, T. (2019). Pembahasan studi kasus sebagai bagian metodologi penelitian. *Jurnal Study Kasus*, 3(1), 1–13.
- Isnaini, N., Roemintoyo, R., & Sukmawati, F. (2023). Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website Sebagai Media Informasi Desa. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5908–5912.
- Nugraha, N., Nugraha, D., & Novantara, P. (2022). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Melalui Pelatihan Microsoft Office di Desa Caracas Kabupaten Kuningan. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment*, 1(1), 17–22.
- Nurahma, G. A., & Hendriani, W. (2021). Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Mediapsi*, 7(2), 119–129.
- Rachman, F., Batubara, A., & Kabatiah, M. (2022). *Pendampingan Mewujudkan Sdgs Desa Point Partnership For The Goals Melalui Sistem Informasi Desa Berbasis Web Sebagai Respresentasi Desa Wisata Berkelanjutan*.
- Rahman, A., Sakurai, A., & Munadi, K. (2017). Indigenous knowledge management to enhance community resilience to tsunami risk: lessons learned from Smong traditions in Simeulue island, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 56, 012018.
- Rizal, A., Triandani, S., April, M., & Alkadafi, M. (2022). Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penataan administrasi pemerintahan desa berbasis teknologi informasi (e-government). *Jurnal El-Riyasah*, 13(1), 76–91.
- Saputra, L., Muryani, C., & Karyanto, P. (2018). Analysis on Social Capital of Community at Subah Village Tayan Hilir in Tourism Development of Lake Lait. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 145(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/145/1/012065>